

Daftar Bacaan

Buku:

Istianto, Babang, *Privatisasi dalam model Public Private Partnership*, Mitra Wacana Media Penerbit, Jakarta, 2011

Adolf, Huala, *Hukum Perdagangan International*, Rajawali Pers, Jakarta

HS. Salim, *Hukum Investasi di Indonesia*, 2012 Rajawali pers : Jakarta

Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008

Mazuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2013

Jon Valentine , “*Public-Private Partnerships in Infrastructure: Best-Practices from the International Experience and Applications for Thailand*”, Intern, NESDB, 2008

Jurnal:

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, *Draft Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional Tahun 2012 – 2031*, Jakarta 25 April 2005

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), *Rencana Usaha Penyediaan tenaga Listrik 2013-2022*, Jakarta 31 Desember 2013

Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, *Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) Panduan Bagi Investor Dalam Investasi di Bidang Infrastrukur*, April 2010

“Mengapa Perlu Ada KPS” *Sustaining Partnership Media Informasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta*, Edisi Khusus Tahapan KPS, 2011

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), *Rencana Usaha Penyediaan tenaga Listrik 2013-2022*, Jakarta 31 Desember 2013

Public-Private Partnerships : Infrastructure Projects Plan in Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 2013

Sustaining Partnership: Media Informasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta, Edisi Khusus Tahapan KPS, November 2011

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) : *Panduan Bagi Investor Dalam Investasi Di Bidang Infrastruktur*, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, 2010

“Bisnis dan Investasi” *Kontan* No. 21-XVI, Edisi 20-26 Februari 2012, rubrik Analisis Ekonomi

Thesis:

Heru Setiawan, *“Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Terhadap PT PLN (Persero) dan Peluang Swasta dalam Industri Ketenagalistrikan (Suatu Tinjauan Yuridis)”*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011

Website:

<http://indonesiaindonesia.com/f/102264-sejarah-revolusi-industri/> diakses 20 September 2014

<http://www.tempo.co/read/news/2014/02/10/090552911/Begini-Strategi-PLN-Menggenjot-Rasio-Elektrifikasi> diakses pada 29 Desember 2014

http://listrikindonesia.com/percepat_pembangunan_infrastruktur_ketenagalistrikan_584.htm diakses 18 Oktober 2014

Ilmar Amminudin, *Hak Menguasai negara dalam Privatisasi BUMN*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2012 h. 53

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11758/mk-batalkan-keberlakuan-uu-ketenagalistrikan> diakses 19 Oktober 2014

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/05/02/0913335/Swasta.Siap.Bangun.Pembangkit.Listrik.Sendiri.Tapi> diakses pada tanggal 1 Januari 2014

http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&id_subyek=12 diakses pada tanggal 3 Januari 2014

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan No. 135 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah.

Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Negatif Investasi

Peraturan presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (sebagai revisi atas Kepres Nomor 7 Tahun 1998);

Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Perturan Presiden Nomor 66 tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Pepres Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Risiko atas Penyediaan Infrastruktur.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Nomor 4 Tahun 2006 tentang Metodologi Evaluasi Proyek Infrastruktur KPS yang memerlukan dukungan pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketengalistrikan

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2005 atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1998 tentang Ketentuan dan Pemanfaatan Ketenagalistrikan

Peraturan Menteri Perindustrian No. 04/M-IND/PER/1/2009 Tentang Pedoman Penggunaan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan kepada PT PLN (Persero) untuk melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta